

ANALISIS UMUM TERHADAP KUA DAN PPAS TA 2010 KABUPATEN LOMBOK BARAT

**OLEH TIM PEDULI ANGGARAN PRO POOR & RESPONSIF GENDER
(MPA LOBAR DAN YPKM NTB)**

Dalam Hearing Dengan Panggar & Komisi II DPRD, Nopember 2009

PENDAHULUAN

Semangat dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan segenap aturan turunannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dan salah satu langkah utama adalah tata pengelolaan keuangan daerah harus menjadi komponen *good governance*, yaitu pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efisiensi, efektifitas, Dan keberpihakan pada kelompok miskin baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyusunan rencana kerja pemerintah harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan juga UU No. 32 tahun 2004, pasal 139 ayat 1 tentang pemerintahan daerah dimana Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan ataupun pembahasan rancangan perda, maka dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS yang akan menjadi barometer penyusunan dan pembahan Ranperda APBD TA 2010, Majelis Peduli Anggaran dan YPKM NTB bermaksud menyampaikan pendapat sebagai hasil analisis terhadap rancangan KUA dan PPAS Lombok Barat TA 2010 yang disusun berdasarkan hajat dengan kerangka sebagai berikut;

1. *Konsistensi Penetapan Program Prioritas dan Prioritas Belanja*; apakah sudah konsistensi dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD, kemudian apakah sudah betul-betul menjawab problem daerah sebagaimana disampaikan dalam Bab Analisa Makro Ekonomi dan Asumsi-asumsi mikro daerah dan tentunya kemampuan keuangan daerah.
2. *Kajian seputar arah kebijakan dalam bidang pendapatan*; apakah sudah maksimal digali sebagai sumber pendapatan daerah dengan tidak merugikan masyarakat miskin, atau sebaliknya, maksimal pengalihan pada sektor yang berurusan dengan masyarakat miskin sementara yang lainnya diabaikan
3. *Belanja daerah*; kearah mana belanja daerah di alamatkan? Belanja Tidak Langsung; apakah alokasi belanja pegawai dominan?, lalu apakah Belanja Bantuan Sosial lebih dominan dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa?. Sementara Belanja Langsung, apakah sudah mengarah untuk menjawab masing-masing program prioritas yang telah ditetapkan dalam KUA secara adil dan merata?
4. *Pembiayaan*; dari mana sumbernya? Apakah dari hutang?, lalu untuk apa peruntukannya; apakah investasi atau bayar hutang?

APAKAH ISI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN SUDAH SINGKRON? TERUTAMA DALAM PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS?

Perda No. 5 tahun 2009 tentang RPJMD disebutkan bahwa Visi Lombok Barat adalah *Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju*, dengan 6 misi turunannya. Kemudian Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam Dokumen KUA TA 2010 menjadi 6 program/kegiatan prioritas, yaitu (1) Peningkatan Kualitas SDM (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (4) Penyelesaian infrastruktur pemerintahan (5) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan (6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Industri kecil dan UKM) (KUA Lobar TA 2010 hal. 24) dengan mengarahkan secara optimal semua belanja daerah TA 2010. (Baca; PPAS TA 2010, BAB II Hal 8), sebab tahun 2010 hanya ada 6 Masalah utama yang dihadapi Lombok Barat, yaitu (1) Rendahnya kualitas SDM (2) Rendahnya kemampuan pelayanan infastruktur daerah (3) rendanya derajat kesehatan dan sttus gizi masyarakat (4) Belum terlaksananya tata kelola pemerintahan secara baik (Goodgovernance) (5) Rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lngkungan hidup (6) Rendahnya pertumbuhan ekonomi (KUA Lobar 2010 Hal. 21-22).

Visi dan Misi Lombok Barat yang demikian ambisius akan dicapai dalam 5 tahun ke depan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk belanja daerah. Namun dalam hal ini, ditetapkan 6 perioritas pembangunan dalam KUA dan 6 perioritas belanja dalam PPAS. Secara redaksional, antara 6 Prioritas dalam KUA dan PPAS tersebut terdapat perbedaan yang bisa disalah maknakan, atau menjadi bahan berkehit dalam mengalokasikan anggaran secara sepihak. Kemudian dengan memperhatikan jumlah Belanja Daerah yang diprediksikan sebesar Rp.620.006.637.804 dengan alokasi Belanja Tidak Langusngnya mecapai Rp.475.317.727.804 (76,66%), maka sangat mustahil bisa mewujudkan 6 program prioritas ini hanya dengan mengandal dana yang teralokasikana dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 144.688.910.000 (23,34%).

Oleh karena itu, kami berpendapat sebaiknya Prioritas Pembangunan Daerah dan arah Belanja Anggaran tahun 2010 diarahkan pada 3 prioritas utama, yaitu;

- **Peningkatan Kualitas SDM yang di dalamnya diarahkan pada pememrataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat**
- **Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yang diarahkan untuk percepatan pembangunan insfratsruktur dasar di pedesaan dan Kantor Pemerintahan**

- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat**

ARAH KEBIJAKAN DALAM PENDAPATAN DAERAH

Apakah Masyarakat Diuntungkan atau Dirugikan Dengan PAD?

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Lombok Barat yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 2007-2009 secara trend nominalnya terus meningkat. TA 2008 sebesar Rp. 656 Milyar, TA 2009 sebesar Rp. 455 Milyar, TA 2009 Perubahan sebesar Rp. 518 Milyar dan TA 2010 mencapai 568 Milyar. namun pertumbuhan nominalnya justru fluktuatif, drop turun drastis pada tahun 2009 karena pemekaran, namun setelah pemekaran juga tampak terus menurun. Tapi yang pasti, Pendapatan Daerah TA 2010 mengalami kenaikan prediksi sebesar Rp. 48.914.453.220 atau 9,41% dari tahun sebelumnya, yang akan diperoleh melalui sumber berikut;

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD tahun 2010 diprediksi akan naik sebesar Rp. 13.750.575.193 atau 34,87% dari tahun sebelumnya. Dengan klasifikasi sumbernya sebagai berikut;

- a. Pajak Daerah naik sebesar Rp. 1.534.397.900 atau 6,50%
- b. Retribusi Daerah naik sebesar Rp. 3.368.216.100 atau 71,70%
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp. 387.445.807 atau 6,37%
- d. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar Rp. 9.235.407.000 atau 182,89%

Coba perhatikan, pajak daerah naik hanya 6,50% dan Retribusi Daerah naik 71,70%. Dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010 dijelaskan agar ***PAD justru tidak memberatkan masyarakat miskin dan menyalurkan iklim usaha. Bila kedua sumber PAD ini naik, maka pasti memberatkan masyarakat Miskin dan menyalurkan iklim usaha, sebab ini pasti akan bersumber dari jasa layanan dan jasa usaha.*** Lalu kenapa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan? **Ada apa dan kemana kekayaan Lombok Barat yang demikian kaya dan subur?** Oleh karena itu, Sebelum menyepakati KUA dan PPAS 2010 DPRD;

1. **Harus berani menuntut eksekutif menyajikan data sumber Pajak dan Retribusi serta sumber aset lainnya,**
2. **Harus berni memastikan agar dalam Arah Penggalan PAD dibatasi pada hal-hal yang wajar tanpa membebani masyarakat miskin dan menghambat iklim berusaha masyarakat miskin.**

Dana Perimbangan

Dana perimbangan diprediksi akan meningkat sebesar Rp.78,699,837,432.00 atau 19,76% dengan rincian sebagai berikut;

- Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 2.256.765.568 atau 9,75%
- Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.815.503000 atau 26,48%
- Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar Rp. 4.858.900.000 atau 9,54%

Apa kinerja Pemerintah Daerah sehingga Dana bagi hasil Pajak dan DAK justru mengalami penurunan? Padahal DAK masih bisa dan seharusnya bisa meningkat dengan intensitas perjalanan daerah pejabat daerah ke jakarta?

DPRD penting melakukan klarifikasi soal ini, terutama soal dana bagi hasil pajak dan non pajak. Kok bisa turun?

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan Yang Sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 43.535.949.404 atau 53,11% dengan rincian sebagai berikut;

- Pendapatan Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 490.052.000 atau 4,08%
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 1.092.415.999 atau 5,29%
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 4.933.585.405 atau 87,04%.

Bila dana bagi hasil Pajak dari Propinsi mengalami penurunan, maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat Lombok Barat

mengalami penurunan. Sebab, bagi hasil pajak ini akan diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Bila turun, maka tingkat daya beli dan kepemilikan masyarakat Lobar terhadap motor dan mobil terus berkurang? Padahal kepadatan jalan raya semakin terasa? Adakah pencuitan perkiraan pendapatan? Penting di croscek oleh DPRD

ARAH BELANJA DAERAH

Apakah Lebih Besar Untuk Gaji Atau Biaya Program?

BTL ; 76,66% ; BL ; 23,34%

Total Belanja Daerah tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp. 620.006.637.804 dengan alokasi Belanja Tidak Langsungnya sebesar Rp. 475.317.727.804 (76,66%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 144.688.910.000 (23,34%). **Mungkinkah 6 program prioritas yang ditetapkan dalam KUA ini dapat dilaksanakan dan dialokasikan anggaran yang memadai serta merata hanya anggaran 144 Milyar?**

Besarnya alokasi Belanja Tidak Langsung mencapai 76,66% dari total Belanja Daerah disebabkan oleh banyaknya Pegawai Lombok Barat yang tahun 2010 untuk gaji, asumsi kenaikan gaji 5% dan penyediaan gaji 13 untuk 8912 Orang Pegawai mencapai Rp. 407.251.727.804 Milyar. Padahal dalam Dokumen APBD TA 2009 jumlah PNS Lobar sebanyak 6210 Orang. Dengan jumlah Pegawai yang mencapai 8912 orang tahun 2010, Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan Daerah yang tahun 2010 sebesar Rp. 409.929.312.000 Milyar – Belanja Pegawai Rp. 407.251.727.804 Milyar, maka hanya tersisi ± Rp. 2 milyar. **Artinya, penambahan jumlah pegawai tidak sebanding dengan kenaikan jumlah DAU. Bila tidak dikontrol, maka bisa jadi tahun berikutnya, DAU, DAK dan PAD akan habis untuk gaji pegawai.** Oleh Karena itu, DPRD penting segera;

1. Update data PNS yang digaji daerah, sehingga bisa diormulasikan alokasi sesungguhnya dengan prediksi kenaikan gaji 5% dan tambahan gaji ke 13.
2. Penting ada kebijakan daerah yang membatasi penerimaan PNS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta bagaimana memaksimalkan pendayagunaan PNS yang ada untuk bisa memaksimalkan semua bentuk layanan yang dibutuhkan masyarakat.
3. DPRD juga penting memperhatikan arah belanja daerah baik pada BTL maupun BL dengan memperhatikan azas manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Sehingga dapat

diformulasikan kebijakan dengan menetapkan arah dan persentase masing-masing belanja sebagai berikut;

Jenis Belanja (BTL)	Porsi Ideal	Jenis Belanja (BL)	Porsi Ideal
Belanja Pegawai	60%	Belanja Pegawai	10%
Belanja Hibah	0,5%	Belanja Barang Jasa	20%
Belanja Sosial	2,5%	Belanja Modal	70%
Belanja Bagi hasil	Sesuai Rumus		
Belanja Bantuan Keu ke Pemdes	35%		
Belanja Tak Terduga	0,5%		

MEMILIH BELANJA KEUANGAN KE DESA SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 475.317.727.804 (76,66% dari total Belanja) Sebanyak Rp. 407.251.727.804 milyar tidak bisa digangguat untuk Belanja Pegawai. **Artinya, Sisa Anggaran BTL sebesar Rp. 68.066.000.000 Milyar akan dipakai untuk beberapa jenis belanja, seperti Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Ke Desa dan Biaya Tak Terduga. Beranikah DPRD mengarahkan alokasi anggaran Rp. 68 milyar ini dengan mematok Jatah Rp.60 Milyar untuk Belanja Bantuan Keuangan Ke Pemdes; baik sebagai ADD dan sebagai Belanja Tunjangan Aparatur Desa? Sedangkan sisianya Rp. 8,06 Milyar dialokasikan untuk Belanja yang lain (hibah, Bantuan Sosial, Bagi hasil dan Dana Tak Terduga).**

Bila DPRD berani, maka Rp. 60 Milyar yang akan diarahkan ke 88 desa, diperuntukkan Rp. 10 Milyar Untuk Tunjangan Aparatur Desa Setahun (meningkat 1 kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 5 Milyar) dan Rp. 50 Milyar untuk ADD bagi 88 Desa, secara merata desa akan mendapatkan ADD Rp.568,181,818.18 (Persentase Paling Besar dari Seluruh Kabupaten Se Indonesia). Tetapi dengan catatan, Gerdu Bangdes dengan segenap indikator yang ingin dicapainya pasti akan bisa terlaksana dan tercapai, dan bahkan sebagian besar program dan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD sudah dapat ditangglangi di desa dengan dana ADD ini. Bila ini terlaksana, maka DPRD telah berhasil mewujudkan apa yang disebut sebagai **KEBIJAKAN PRO RAKYAT, KEBIJAKAN POPULIS, KEBIJAKAN BERKEADILAN DAN KEBIJAKAN INOVATIF**. Kebijakan ini akan berdampak menjadi ***pembelajaran bermakna bagi demokrasi, dimana upaya mewujudkan masyarakat yang kritis, partisipatif dalam pembangunan akan segera terwujud melalui partisipasi dan daya control mereka di desa. Bila alokasi anggaran ke desa dapat dipastikan dalam APBD yang diketok diakhir tahun sebelum tahun***

anggaran berjalan, maka pada saat perencanaan tahun anggaran yang akan datang, di desa bisa sekaligus memnfaatkan perencanaan (musrenbangdesa) sebagai wadah merumuskan program prioritas dan APBDes secara partisipati, transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat miskin termasuk keompok perempuan di dalamnya.

Tentu kebijakan ini harus diikuti dengan adanya Kebijakan Yang mengatur pada program dan kegiatan apa dana ini harus diperuntukkan, bagaimana pengelolaannya, pertanggungjawabannya... kebijakan skema monitoring partisipatif, transparan, akuntabel sebagai ciri GOOD GOVERNANCE harus ada dan pasti terwujud di LOBAR

KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA LANGSUNG/PUBLIK

Belanja Modal (bahan dan investasi) harus lebih besar dari Ongkos Tukang (Jasa)

Belanja Langsung yang nilainya sebesar Rp. 144.688.910.000 (23,34%), diperketat lagi untuk mencapai 3 perioritas dengan mematok standar porsentase 10 % untuk Belanja Pegawai, 20 % Belanja Barang dan Jasa dan 70% Belanja Modal, maka akan tampak hasil pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun, tetapi bila secara terus menerus setiap tahun semua hal ingin dibangun dengan alokasi anggaran yan terbatas maka hasilnya pun sekedar cantik sesaat namun pada ujungnya nanti akan keriput jua.

Penetapan prioritas pada pembangunan insfrastruktur kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan dengan infrastruktur pemerintahan, maka akan bisa seimbang belanja untuk keduanya. Sebab, dalam APBD sebelumnya, belanja infrastruktur hampir seluruhnya adalah belanja pemerintahan, dikantor pemerintah dan untuk kantor pemerintah, kecuali hanya sedikit ifrastruktur dasar di desa berupa jaringan irigasi dan perbaikan jalan dan jembatan. **Gambaran Porsentase Belanja Sektoral & Prioritas Pembangunan dalam Tabel berikut;**

Sektor/Urusan Belanja	Total Belanja Daerah	% Total Belanja
	663,780,462,000.00	
Pendidikan	224,131,918,216.00	33.77%
Kesehatan	45,851,209,696.00	6.91%
Ekonomi	75,657,046,649.00	11.40%
Perumahan dan Fasilitas Umum	32,605,722,316.00	4.91%
Administrasi Pemerintah (rutin dan umum)	201,957,234,949.00	30.43%

Bila prioritas pembangunan sebagaimana dalam KUA yang diarahkan ke 6 hal, yaitu : (1) Peningatan Kwalitas SDM (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (4) Penyelesaian infrastruktur

pemerintahan (5) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan (6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Industri kecil dan UKM). Kemudian dibandingkan dengan persentase dalam tabel di atas, maka Kesehatan hanya mencapai 6 %, ekonomi hanya 11% dan Fasilitas Umum (infrastruktur) hanya 4 %, sementara yang rutin mencapai 30%.

Dengan demikian, 6 prioritas dalam KUA dengan alokasi yang sangat terbatas, dapat dikatakan hanya rumusan redaksional belaka. Tugas DPRD adalah bagaimana mengarahkan dan memprioritaskan pembangunan dengan keterbatasan dana pembangunan setelah diambil oleh dana rutin.

Demikian, TIM MPA-YPKM NTB